

Workshop Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar

Ismah Rustam¹, Syaiful Anam², Zulkarnain³, Y.A.Wahyuddin⁴
^{1,2,3,4}Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Mataram
ismahrustam@unram.ac.id

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini ditujukan untuk para calon aparatur pemerintah NTB yaitu praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) kampus Nusa Tenggara Barat (NTB). Sebagai calon pemangku kebijakan maka perlu dikenalkan metode diplomasi, dalam hal ini diplomasi maritim sebagai bentuk dukungan untuk visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia dimana pemerintah daerah memiliki peran besar didalamnya. NTB sebagai provinsi yang terdiri dari banyak pulau dan wilayah perairan luas menyimpan potensi maritim yang membutuhkan pengelolaan berkelanjutan yang didukung kerjasama dengan berbagai pihak. Wilayah perairan utama NTB tidak hanya menyimpan potensi keanekaragaman hayati dan lingkungan dengan nilai ekonomis dan ekologis yang tinggi maupun potensi wisata bahari, namun juga keberadaan Selat Lombok sebagai jalur perdagangan internasional memberikan banyak keuntungan secara geostrategis. Pengenalan potensi maritim dan pelatihan diplomasi maritim merupakan program utama dari usul pengabdian yang bertujuan untuk menambah kemampuan para calon aparatur negara dalam memaksimalkan keunggulan potensi maritim lokal.

Kata Kunci: Diplomasi Maritim, Potensi Maritim, dan Aparatur Negara

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang terletak dalam persimpangan Asia Pasifik dengan postur memanjang dan bentuk kepulauan. Kebutuhan negara-negara besar terhadap Indonesia salah satunya adalah ketersediaan jalur lautnya. Indonesia dianugerahi terdiri banyak pulau dan lautan yang luas membuat Indonesia menjadi jantung utama keberhasilan perdagangan Internasional. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di Asia yang terdiri dari 17.506 pulau-pulau besardan kecilsertaluas wilayah lebih dari 7.7 juta km², dimana 2/3 bagiannya merupakan perairan seluas lebih dari 5.8 juta km².⁶ Sebagai sebuah negara kepulauan yang statusnya diakui oleh masyarakat internasional, Indonesia memikul tanggung jawab terhadap pengawasan wilayah laut. dalam hal ini Indonesia telah mengemban amanah sebagai penyedia jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) yang dibagi menjadi 3 jalur utama. Selain itu Indonesia juga diwajibkan memberikan jalur lintas damai dan lintas transit bagi semua pelayaran yang melalui wilayah perairan Indonesia dengan berbagai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam hukum laut Internasional.

Selat Lombok adalah satu *choke point* penting di Indonesia. Sebuah jalur pelayaran yang terletak di bagian selatan dari Indonesia termasuk dalam status Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang terbentuk setelah Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982

6 Wahyono, S.K. (2007) *Indonesia Negara Maritim*. Teraju (Anggota IKAPI), Jakarta. Hal. 22

atas konsekuensi pengakuan status Indonesia sebagai Negara Kepulauan⁷. Hal ini dilandasi atas geopolitik dan geostrategis di sekitar Indonesia.⁸ ALKI II sendiri merupakan alur laut untuk menghubungkan pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok menuju Samudera Hindia dan sebaliknya. Selat Lombok dan Selat Makassar termasuk dalam kategori laut dalam. Sementara Laut Sulawesi memiliki kedalaman hampir mencapai 6.200 m. Alur ALKI II menjadi jalur alternatif kedua setelah Selat Malaka, yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan terlihat secara geografis memanjang dari selatan selat Makassar hingga ke utara Laut Sulawesi. Pintu utama bagian selatan dari ALKI II, yaitu Selat Lombok memiliki letak yang berhadapan langsung dengan dua negara besar Australia dan Selandia Baru. Kedua negara yang berada di selatan bumi ini membutuhkan jalur ALKI II bagi pelayaran kapal angkut menuju Asia Timur dan sebaliknya. Sementara kapal-kapal tanker raksasa yang berbobot lebih dari 200.000 ton dengan sarat muatan lebih memilih jalur ALKI II ketimbang melewati Selat Malaka karena sangat berbahaya dan mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran. Ketidaksihesuaian bobot dengan kedalaman alur di Selat Malaka akan menyebabkan kapal kandas serta merugikan banyak pihak.⁹

Diplomasi maritim menjadi salah satu cara untuk memaksimalkan posisi strategis Indonesia sebagai jalur persimpangan dunia. Selat Lombok sebagai sebuah jalur strategis di kawasan selatan merupakan salah satu pendukung dan penguatan pencapaian cita-cita menjadi bangsa maritim yang kuat, salah satu gagasan Indonesia adalah melalui Poros Maritim Dunia. tentu menuju gagasan besar tersebut membutuhkan peran dari pemerintah daerah dan *stakeholder* terkait terutama dalam ranah kebijakan. Semenjak digulirkannya kebijakan otonomi daerah di era reformasi hal ini memperlihatkan bahwa daerah, dalam ini baik pemerintah kota, kabupaten, maupun provinsi memiliki peran dan andil penuh dalam mengelola pembangunan daerahnya masing-masing untuk kemajuan daerah dan masyarakatnya. Selain itu pula, hal ini juga memperlihatkan bahwa Pemerintah Daerah telah menjadi aktor penting dalam hubungan internasional dimana pada lini-lini tertentu secara legal memiliki hak untuk melakukan kerjasama internasional dengan pihak asing baik itu investor asing maupun pemerintah dari negara mitra kerjasama dengan tujuan untuk kemajuan daerah tersebut. Untuk mendukung optimalisasi pembangunan daerah yang sifatnya berkelanjutan, maka pemerintah daerah menjadi ujung tombak untuk mendukung terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia sebagai sebuah negara maju. Kebutuhan akan andil pemerintah daerah yang proaktif dan memiliki strategi dalam menjalin mitra dalam bentuk kerjasama internasional sangat dibutuhkan.

⁷ *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* atau konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 (yang diratifikasi dengan UU no.17 tahun 1985) telah dinyatakan sebagai hukum positif internasional sejak 16 November 1994, konvensi PBB tersebut mengakui hak Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Yang dimaksud status tersebut ialah suatu negara suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan. adalah konsep Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia yang membentang dari pulau We sampai merauke memiliki wilayah perairan yang menjadi primadona di dunia (Wahyono, 2007).

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, "Wawasan Nusantara dari Segi Geopolitik dan Geostrategis", Dalam *"Strategi Kelautan; Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional"*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 107

⁹ Thoyib, Syarif., *Potensi Ancaman di Alur Laut Kepulauan Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus: Potensi Ancaman di Alur Laut Kepulauan Indonesia II)*, Thesis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2009, hal. 33.

Berangkat dari situasi tersebutlah maka pengabdian masyarakat kali ini berusaha untuk memberikan suatu penguatan peran dan strategi mengenai Kerjasama Internasional terutama dengan tema mengangkat potensi kemaritiman daerah yang ditujukan bagi praja IPDN di Praya Lombok Tengah. Kegiatan ini antara lain berkaitan dengan UU. No.37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang mana keduanya memberikan kerangka hukum yang jelas bagi berlakunya aktivitas kerja sama internasional bagi Pemda yang relevan bagi kepentingan pembangunan daerah. Selain itu, kegiatan ini juga berkaitan dengan UU No.32/2004 tentang tugas dan wewenang DPRD dan Pemda dalam pembuatan perjanjian internasional di daerah serta UU Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014 Bab I, Pasal I, poin 13: Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

IDENTIFIKASI MASALAH

Dengan mempelajari analisis situasi dan pentingnya upaya penguatan Peran dan Strategi Calon Aparatur Pemerintah Daerah NTB Dalam Kerjasama Internasional untuk pembangunan berkelanjutan, kami mengangkat tema “Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar” yang dilaksanakan di Kampus IPDN Praya Lombok Tengah, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan pemahaman calon aparatur Pemda NTB, yakni mahasiswa IPDN Praya Lombok Tengah, terkait tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah daerah di era globalisasi dan otonomi daerah saat ini untuk memanfaatkan potensi maritim daerah, khususnya NTB dan secara umum Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Perlunya penyuluhan atau workshop untuk lebih memahami strategi dan ide-ide apa yang harus dimiliki dalam meningkatkan kerjasama internasional melalui potensi maritim lokal agar mampu mewujudkan pembangunan berkelanjutan terutama yang berbasis maritim yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat.

TUJUAN KEGIATAN

Tujuan dari kegiatan ini antara lain:

1. Bertambahnya pemahaman mahasiswa IPDN Praya Lombok Tengah terkait tantangan dan peluang yang dihadapi pemerintah daerah dalam era globalisasi dan regionalisasi saat ini
2. Dapat memberikan informasi mengenai tips, strategi, konsep, dan ide-ide yang diperlukan dalam meningkatkan kerjasama internasional daerah dengan pihak investor asing dan pemerintah daerah dari negara lain.
3. Meningkatnya kesadaran akan pentingnya peran pemerintah daerah dalam meningkatkan kerjasama internasional guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di daerah.

Kegunaan kegiatan ini adalah untuk memberikan pemahaman mengenai konsep- konsep penting dalam terminologi hubungan internasional, khususnya dalam aspek kerjasama internasional. Dari kegiatan ini output yang diharapkan adalah mahasiswa- mahasiswi praja IPDN Praya-Lombok Tengah memiliki pemahaman dan ide-ide yang nantinya dapat dipergunakan atau diimplementasikan ketika mereka telah resmi dan

bekerja menjadi aparatur pemerintah daerah di daerahnya masing-masing. Selain itu pula diharapkan calon-calon aparatur pemerintah daerah ini nantinya memiliki visi misi yang didasari dengan konsep yang matang dalam membawa daerahnya masing-masing kearah pembangunan yang berkelanjutan dengan mitra kerjasama yang tidak hanya pada level nasional tetapi pada level internasional.

METODE PENGABDIAN

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka kegiatan workshop ini berupaya memberikan pemecahan masalah dalam bentuk pemberian materi/ceramah, *focus group discussion* (FGD), dan simulasi-simulasi. Materi akan berkisar terkait konsep-konsep dalam Hubungan Internasional antara lain pemahaman mengenai konsep diplomasi maritim, konsep perdagangan internasional dan konsep poros maritim Indonesia. Konsep-konsep ini nantinya akan dibicarakan dan didiskusikan dan selanjutnya peserta workshop akan diminta untuk membuat konsep rancangan pembangunan daerahnya masing-masing dalam kerangka kerjasama internasional dengan menggunakan konsep-konsep yang telah dijelaskan itu.

Metode yang digunakan dalam Workshop Penguatan Peran dan Strategi Calon Aparatur Pemerintah Daerah NTB Dalam Kerjasama Internasional Untuk Pembangunan Berkelanjutan adalah dengan pemberian materi/kuliah di kelas dan *Focus Group Discussion* (FGD), selain itu akan ada bentuk pelatihan dimana praja IPDN akan melakukan simulasi model pelaksanaan diplomasi maritim.

Tabel 1. Input/Program, Output, dan Outcome

Kegiatan *Workshop* Diplomasi Maritim Memanfaatkan Posisi Strategis Indonesia dalam Jalur Perdagangan Dunia: Meninjau Selat Lombok-Selat Makassar

Input/Program	Output		Outcome
	Proses/Kegiatan	Partisipan	
Pengenalan konsep-konsep yang relevan dengan tema yang diangkat serta menggali potensi maritim khususnya di Nusa Tenggara Barat dan Indonesia kepada Praja IPDN	<ul style="list-style-type: none"> • Pemutaran Film pendek tentang potensi Maritim • Penjelasan materi • Simulasi pelaksanaan diplomasi dan FGD 	Praja IPDN kampus Nusa Tenggara Barat	Kemampuan para praja dalam melakukan teknik diplomasi dengan penguasaan konsep-konsep kemaritiman

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan di IPDN Praya Lombok Tengah menjadi wadah keilmuan yang memberikan edukasi mengenai pentingnya mengenal potensi daerah dalam bidang maritim. Sebanyak 393 praja hadir menerima materi mengenai potensi maritim di NTB dan Selat Lombok serta aktif dalam diskusi. Diantara materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut antara lain:

1. Diplomasi maritim / Paradiplomasi

Diplomasi bukan hanya menjadi penting dalam kurikulum mahasiswa Hubungan Internasional. Sekolah kedinasan seperti IPDN juga membutuhkan kurikulum yang memuat tentang diplomasi. Karena paradiplomasi menjadi salah satu bentuk persaingan negara di era globalisasi saat ini. Paradiplomasi adalah teknik negosiasi yang melibatkan seluruh elemen dalam upaya membangun kerjasama atau perjanjian dengan negara lain.

diversifikasi peran aktor diplomasi memberi kesempatan kepada pemerintah daerah untuk terlibat langsung dalam hubungan internasional seperti investasi, perdagangan, tanpa harus aktif dalam perkara tertentu untuk melapor kepada pemerintah pusat.¹⁰

Indonesia yang memiliki potensi maritim berlimpah harus mampu untuk memaksimalkan potensi tersebut dengan kemampuan bersaing dalam skala internasional. Salah satunya dengan membuka investasi asing. Hal-hal yang berkaitan erat dengan investasi asing langsung memiliki keterkaitan langsung dengan kebijakan otonomi daerah dimana dalam proses pengelolaan investasi maka para investor akan berhadapan langsung dengan kebijakan yang ada di daerah tersebut sehingga akan berdampak positif bagi proses pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Kebanyakan pelaku investasi asing adalah perusahaan multinasional (MNC). Kehadiran MNC sangat mempengaruhi keadaan ekonomi suatu negara, terutama bagi negara dunia ketiga di mana MNC merupakan salah satu sumber modal yang penting bagi pembangunan ekonominya¹¹.

Diplomasi maritim memiliki modal yang kuat untuk mempromosikan Poros Maritim Dunia dan menjaga kepentingan Indonesia.¹² Melalui RPJMN 2015-2019 pemerintah Indonesia berfokus pada permasalahan internal seperti budaya maritim, interkoneksi antar pulau, pengembangan ekonomi maritim maupun penegakan hukum laut. Diplomasi maritim menjadi salah satu bagian yang terintegrasi dengan aktivitas tersebut, sekaligus menjadi jalan bagi pemerintah daerah dalam memaksimalkan potensi maritim untuk kepentingan ekonomi. Tentu hal ini akan berimbas pada kemajuan sebuah daerah. Termasuk provinsi NTB yang memang secara geografi merupakan provinsi kepulauan dengan lebih dari 200 pulau kecil didalamnya. Untuk memajukan pariwisata bahari yang dimiliki, pemerintah daerah NTB harus mengelola setiap sudut potensi untuk menjadi kawasan pariwisata yang unggul. Tentu tidak bisa dikerjakan sendiri, dibutuhkan kerjasama dengan berbagai pihak dan stakeholder terkait. Dalam hal lain, dibukanya pariwisata bahari tentu membuka peluang juga terjadi ancaman terutama model ancaman keamanan transnasional seperti narkoba, human trafficking, penyelundupan barang-barang ilegal lainnya. Dari *United Nations* melalui *Report on Oceans and the Law of the Sea* ancaman terhadap keamanan maritim terbagi dalam berbagai bentuk, yaitu ; perompakan dan penyerangan bersenjata terhadap kapal, aksi terorisme dalam pelayaran, instalasi lepas pantai, penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, *Illegal, Unreported, and Unregulated (IUU) fishing* dan aktivitas mencedera lingkungan bahari.¹³ Diplomasi maritim untuk meningkatkan keamanan maritim menjadi salah satu poin penting juga demi terciptanya kenyamanan untuk semua pihak.

2. Potensi Indonesia sebagai Negara Kepulauan dan Selat Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Jalur Pelayaran Internasional

Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau yang menjuntai dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Rote. Indonesia memiliki laut yang begitu luas dua kali lipat dari luas daratan. Sebelum Indonesia diakui sebagai Negara Kepulauan, laut Indonesia masuk dalam kategori laut internasional. Dimana lautan yang berada diantara pulau-pulau bebas dilalui oleh kapal-kapal berbendera asing manapun. Namun jerih payah para diplomat kita dalam mengajukan status Indonesia sebagai negara kepulauan memang mendapatkan

¹⁰ Laode Muhamad Fathun, Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar, Jurnal Indonesian Perspective, Volume 1, Nomor 1 (januari-Juni) hal.3.

¹¹ *ibid*

¹² Nikolaus Loy, dkk., Mengamankan Laut ; Tata Ruang dan Keamanan Maritim, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019, hal.136.

¹³ *Ibid*, hal. 4

hasil maksimal. Ketika Deklarasi Djuanda¹⁴ diumumkan di forum-forum PBB, hampir semua negara yang memiliki kepentingan di wilayah perairan Indonesia menolak. Karena status sebagai negara kepulauan secara otomatis akan menguasai wilayah sejauh garis pangkal batas laut dan kepemilikan secara utuh wilayah darat, laut dan udara. Dengan perjuangan panjang para diplomat Indonesia, akhirnya konsep *Archipelagic State* diterima dalam *United Nations Convention on the Law of the Sea* tahun 1982. Sebagai sebuah negara kepulauan yang statusnya diakui oleh masyarakat internasional, Indonesia memikul tanggung jawab terhadap pengawasan wilayah laut.

Selat Lombok merupakan salah satu jalur perairan yang terletak di bagian selatan dari Indonesia termasuk dalam status Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, yang terbentuk setelah Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982 atas konsekuensi pengakuan status Indonesia sebagai Negara Kepulauan¹⁵. Diadopsi dalam UU No. 6 tahun 1996 dan PP No. 37 tahun 2002 bahwa Selat Lombok dilintasi ALKI II. Jalur ALKI II sendiri merupakan alur laut untuk menghubungkan pelayaran dari Laut Sulawesi melintasi Selat Makassar, Laut Flores dan Selat Lombok menuju Samudera Hindia dan sebaliknya. Alur ALKI II menjadi jalur alternatif kedua setelah Selat Malaka, yang menghubungkan Samudera Pasifik dan Samudera Hindia dan terlihat secara geografis memanjang dari selatan selat Makassar hingga ke utara Laut Sulawesi. Pintu utama bagian selatan dari ALKI II, yaitu Selat Lombok memiliki letak yang berhadapan langsung dengan dua negara besar Australia dan Selandia Baru. Kedua negara yang berada di selatan bumi ini membutuhkan jalur ALKI II bagi pelayaran kapal angkut menuju Asia Timur dan sebaliknya. Sementara kapal-kapal tanker raksasa yang berbobot lebih dari 200.000 ton dengan sarat muatan lebih memilih jalur ALKI II ketimbang melewati Selat Malaka karena sangat berbahaya dan mempunyai resiko tinggi terhadap keselamatan pelayaran.

Gambar 1. Potensi Selat Lombok sebagai jalur pelayaran internasional¹⁶

¹⁴ Deklarasi Djuanda adalah sebuah konsepsi dan prinsip-prinsip negara kepulauan yang diterapkan dan diimplementasikan oleh Indonesia dalam Pengumuman Pemerintah tentang Perairan Indonesia yang ditandatangani oleh Perdana Menteri Ir. H. Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Munadjat Danusaputro, *Implementasi Wawasan Nusantara dan ZEEI dalam Pembangunan Nasional*, dalam *Strategi Kelautan; Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988, hal. 126.

¹⁵ *United Nations Convention On The Law Of The Sea (UNCLOS)* atau konvensi PBB tentang hukum laut tahun 1982 (yang diratifikasi dengan UU no.17 tahun 1985) telah dinyatakan sebagai hukum positif internasional sejak 16 November 1994, konvensi PBB tersebut mengakui hak Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Yang dimaksud status tersebut ialah suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih gugusan kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Konvensi menentukan pula bahwa gugusan kepulauan berarti suatu gugusan pulau-pulau termasuk bagian pulau, perairan di antara gugusan pulau-pulau tersebut dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga gugusan pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya tersebut merupakan suatu kesatuan geografi dan politik yang hakiki, atau secara historis telah dianggap sebagai satu kesatuan. adalah konsep Indonesia sebagai negara kepulauan, Indonesia yang membentang dari pulau We sampai merauke memiliki wilayah perairan yang menjadi primadona di dunia (Wahyono, 2007).

¹⁶ Data Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam

[http://lombokbaratkab.go.id/wp-](http://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Slide5.jpg)
diakses tanggal 10 Juni 2016.

[content/uploads/2016/11/Slide5.jpg](http://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Slide5.jpg)



Selain potensi pelayaran, selat Lombok juga menyimpan keunikan yaitu menjembatani destinasi wisata didalamnya. Kedua pulau, Pulau Lombok dan Pulau Bali yang mengapit Selat Lombok merupakan pulau-pulau utama yang menjadi tujuan pariwisata di Indonesia. Dalam hal transportasi, kedua pulau telah memiliki konektivitas yang cukup baik, misalnya *Fastboat* yang memudahkan akses wisatawan lokal maupun asing dalam mengeksplorasi wisata bahari di Bali dan Lombok. Kedatangan kapal-kapal pesiar yang besar berlabuh di perairan Gili Trawangan melalui Selat Lombok dimana kapal tersebut mampu mengangkut 1000 – 2000 wisatawan. Belum lagi kapal *yacht* yang hendak menuju Australia dari arah barat maupun sebaliknya, pasti akan transit ke pelabuhan Lembar atau perairan Gili Trawangan.

Meninjau potensi yang ada di Selat Lombok sendiri, berdasarkan hasil wawancara pada Balai Bio Industri Laut Pusat Penelitian Oseanografi-LIPI menerangkan mengenai potensi laut di Selat Lombok yang begitu berlimpah dan menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Misalnya dalam beberapa tahun ini BBIL LIPI membudidayakan kerang mutiara, abalon, turbo (sejenis siput), tripang hitam, tripang pasir dan lobster. Pelaku pengembangan budidaya hasil laut di sekitar Selat Lombok menjadi bagian dari perwujudan nawacita Presiden Joko Widodo. Selat Lombok merupakan pintu gerbang ke kawasan *Wallacea* yang memiliki keragaman spesies yang tinggi dengan tingkat endemisitas yang tinggi dan dilewati oleh arus lintas Indonesia yang membawa massa air, plankton, dan larva dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia. Pesisir Selat Lombok termasuk dalam wilayah Kabupaten Lombok Barat. Kabupaten Lombok Barat memiliki potensi cukup tinggi dalam hal sumberdaya pesisir dan laut maupun keragaman hayatinya, kawasan ini masih berada dalam tahap inisiasi kawasan konservasi perairan daerah (KKPD). Terdapat berbagai pulau kecil dengan sebutan "Gili" di sepanjang pesisir wilayah pulau ombok. Sebut saja di ombok Barat terdapat Gili Gede, Gili Renggit, Gili Layar, sampai ke Bangko-bangko juga memiliki nilai penting secara ekologis. Hal ini terlihat dari keragaman jenis karang dan ikan karang yang tinggi, serta kondisi substrat dan komunitas ikan karang yang sangat baik. Lokasi ini memiliki nilai estetika lingkungan yang tinggi dan berpotensi untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata bahari.¹⁷

¹⁷ Ismah Rustam, „Makna Strategis Selat Lombok dan Perkembangannya sebagai Jalur Pelayaran Internasional,“

Global and Policy Journal of International Relation, vol. 6, no. 1, 2018, p. 88.

3. Praktek pelaksanaan diplomasi dan sosialisasi potensi kemaritiman NTB kepada masyarakat

Pelaksanaan diplomasi maritim dapat dilakukan dalam berbagai hal. Salah satu bentuk diplomasi yang dipelajari dalam kegiatan ini ialah, peran pemerintah daerah dalam mengajukan status *Particularly Sensitive Sea Area (PSSA)* ; area perairan yang memerlukan perlindungan khusus. Indonesia mengajukan tiga wilayah perairan yakni Selat Lombok, Karimun Jawa, dan Kepulauan Seribu sebagai PSSA. Hal ini berangkat dari keinginan pemerintah untuk memberikan perlindungan yang lebih terhadap pentingnya menjaga area perairan Indonesia sebagai sumber kekayaan global. PSSA menjadi sebuah mekanisme yang digunakan oleh negara pantai untuk melindungi kawasan lautnya dari dampak negatif aktivitas pelayaran internasional. Dengan ditetapkannya PSSA, pemerintah dapat melakukan perlindungan dengan menetapkan kewajiban lapor bagi kapal tanker yang membawa bahan bakar dalam jumlah besar dan menerapkan *traffic separation schemes* guna menghindari tabrakan karena arus kapal yang melintas lebih teratur dengan penerapan dua arah seperti yang sudah diterapkan di Selat Malaka. pengaturan rute pelayaran ditetapkan dan disepakati oleh semua negara disertai dengan penerapan ketentuan MARPOL yang lebih ketat terhadap pembuangan polusi dari operasional kapal. Pemerintah juga dapat menetapkan area larang jangkar, area yang harus dihindari, area wajib pandu, larangan pembuangan air kotor dari tanki kapal dan mengadopsi peraturan *International Maritime Organization (IMO)* lainnya yang terkait dengan perlindungan lingkungan laut. Indonesia dalam waktu dekat mengajukan tiga titik area PSSA, dari ketiga lokasi tersebut salah satunya adalah Selat Lombok dengan mengajukan Kepulauan Gili sebagai *pilot project*. Hal ini sejalan dengan program pemerintah daerah Nusa Tenggara Barat yang begitu konsen untuk pengembangan sektor pariwisata bahari.¹⁸ Oleh karena itu, peran dari pemerintah daerah sangat dibutuhkan dalam melancarkan gagasan tersebut.

SIMPULAN

Setelah pelaksanaan kegiatan workshop kemaritiman ini, dalam hasil dan pembahasan dapat diketahui bahwa sebagian besar praja IPDN yang sekaligus calon aparatur pemerintah kurang memahami tentang paradiplomasi termasuk diplomasi maritim didalamnya. Dimana pemerintah daerah mempunyai andil besar dalam memajukan potensi maritim yang dimiliki masing-masing daerah. Hal tersebut nampak dari berbagai tanggapan dan pertanyaan yang disampaikan peserta. Memang belum ada kurikulum yang memuat secara lengkap mengenai materi diplomasi pemerintah daerah. Namun tidak kalah penting antusiasme praja IPDN terhadap pengembangan potensi kelautan dengan sudut pandang aparatur pemerintahan semakin nampak. Hal ini dibuktikan dengan jalannya diskusi terbuka yang melibatkan para praja IPDN sendiri. Mereka menyampaikan gagasan dan ulasan mengenai hal-hal yang seharusnya dilakukan pemerintah mengingat jati diri Indonesia adalah negara kepulauan.

Untuk mengunggulkan potensi daerah dibutuhkan kerjasama dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pemerintah daerah selaku aktor yang paling mengetahui seluk beluk yang terjadi di wilayahnya. Seperti masuknya investasi asing ke daerah memang dibutuhkan, namun harus dicermati dengan baik oleh pemerintah daerah agar tidak salah langkah. Selain itu, misalnya pengembangan pariwisata bahari membutuhkan upaya untuk memberikan proteksi pada kehidupan bawah laut. salah satu perlindungan yang dapat diajukan pada organisasi maritim internasional (IMO) melalui PSSA. Hal ini juga

¹⁸ Maritime News, 3 Wilayah Perairan Dipilih Jadi PSSA, <https://maritimeneeds.id/3-wilayah-perairan-dipilih-jadi-pssa/> , diakses tanggal 15 September 2017.

mempertuhkan peran aktif dari pemerintah daerah untuk melakukan diplomasi keatas dan upaya sosialisasi ke bawah. Karena salah satu masalah klasik seringkali datang justru dari masyarakat kita yang belum teredukasi dengan baik mengenai perlindungan wilayah laut. sinergisitas bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, stakeholder dan masyarakat adalah kunci kesuksesan pembangunan maritim diseluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Data Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam <http://lombokbaratkab.go.id/wp-content/uploads/2016/11/Slide5.jpg> diakses tanggal 10 Juni 2016.
- I. Rustam, 'Makna Strategis Selat ombok dan Perkembangannya sebagai Jalur Pelayaran Internasional,' *Global and Policy Journal of International Relation*, vol. 6, no. 1, 2018.
- Laode Muhamad Fathun, Paradiplomasi Menuju Kota Dunia: Studi Kasus Pemerintah Kota Makassar, *Jurnal Indonesian Perspective*, Volume 1, Nomor 1 (januari-Juni)
- Mochtar Kusumaatmadja, "Wawasan Nusantara dari Segi Geopolitik dan Geostrategis", Dalam "*Strategi Kelautan; Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Munadjat Danusaputro, "*Implementasi Wawasan Nusantara dan ZEEI dalam Pembangunan Nasional*", dalam "*Strategi Kelautan; Pengembangan Kelautan dalam Perspektif Pembangunan Nasional*", Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988.
- Nikolaus Loy, dkk., Mengamankan Laut ; Tata Ruang dan Keamanan Maritim, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2019.
- Thoyib, Syarif., *Potensi Ancaman di Alur Laut Kepulauan Indonesia dalam Perspektif Ketahanan Nasional (Studi Kasus: Potensi Ancaman di Alur Laut Kepulauan Indonesia II)*, Thesis Program Pascasarjana, Universitas Indonesia, 2009.
- Wahyono, S.K. *Indonesia Negara Maritim*. Teraju (Anggota IKAPI), Jakarta, 2007.